

dengan kondisi milieu dan tingkat budaya lokal; misalnya sesuai dengan lingkungan gunung kapur, daerah turisme, lokasi transmigrasi, daerah perkebunan, dll. Perbedaan situasi dan kondisi rural ini membawa konsekuensi sbb. :

- (1) anak desa membutuhkan kesempatan pendidikan khusus yang diperlukan bagi upaya memahami dunia sekitar, dan proses adaptasi terhadap kebudayaan sendiri, serta pengalaman eksistensial kaumnya.
- (2) Perolehan pendidikan dipakai sebagai sarana untuk memecahkan setiap kesulitan hidup serta mengatasi kemiskinan sehari-hari, agar mereka dapat bertahan hidup, bahkan hidup layak sebagai manusia bebas di alam demokrasi.

Urban way of life (urbanism as a way of life, urban life style) jelas berbeda dengan rural way of life (ruralism as a way of life, rural life style). Situasi-kondisi rural yang berbeda secara ekologis dengan keadaan urban itu melimpahkan kesadaran, gaya hidup dan perilaku khas, juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang berbeda. Karena itu ada kesenjangan fundamental antara dunia pedesaan yang tradisional konservatif dengan dunia élite modern urban; hingga tidak jarang lalu muncul bermacam-macam konflik nilai dan norma rural kontra yang urban. Samuel P. Huntington berkata mengenai hal ini sbb. : "The city and the countryside become different ways of life" (1972, h.72).

Sering kali muncul ketidak-cocokan antara kebijakan nasional dalam perencanaan makro, khususnya di sektor pen -

didikan dengan realitas lokal dan kebutuhan edukatif pada taraf mikro di daerah pedesaan. Timbul banyak prasangka, salah-tafsir dan salah paham terhadap itikad-itikad baik pihak lain yang "ada di luar pagar" (pemerintah, para perencana dan policy-makers di kota). Orang kota ini pada umumnya kurang memahami aspirasi rural mengenai pendidikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa.

Oleh kondisi ekologis yang berbeda-beda, pola interaksi penghuni daerah pedesaan juga berbeda dengan pola orang kota. Maka selama k.l. setengah abad terakhir sekolah/pendidikan di daerah pedesaan mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan sekolah di kota-kota. Persekolahan di daerah perkotaan berkembang pesat secepat perkembangan fisik di sektor ekonomi modern, khususnya sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah di kota mengarah pada spesialisasi dan diversifikasi. Sebaliknya sekolah-sekolah di daerah pedesaan tumbuh lamban, monolitik (satu jenis/SD saja), dan baru tumbuh secara kuantitatif.

Disebabkan oleh sedikitnya fasilitas pendidikan dan training, anak-anak muda desa pada umumnya mendapatkan jumlah tahun pengajaran formal jauh lebih pendek daripada anak-anak kota; hal ini diperkuat oleh lemahnya kondisi sosial-ekonomis warga-desa pada umumnya. Walaupun edukasi merupakan hal yang sangat didambakan oleh banyak warga-desa sebagai benda konsumtif atau tujuan

akhir , namun bagi kebanyakan warga, pendidikan SD masih dirasakan mahal; merupakan "benda lux" di tengah standard kehidupan rakyat yang rendah, dan hasil tenaga didiknya ternyata "murah dijual" di pasaran kerja.

Hasil penelitian penulis menunjukkan, bahwa sebagian besar lulusan SD desa tidak ingin menjadi petani seperti orang tua mereka, tetapi mereka lebih suka menjadi pegawai negeri di kemudian hari (60,88%). Berkaitan dengan hal ini oleh masyarakat desa dirasakan adanya kesenjangan antara keluaran SD dengan budaya agraris , budaya daerahnya. Sebab lulusan SD tidak memperoleh bekal teknis dan kesiapan mental untuk bekerja di bidang pertanian. Daerah pedesaan tidak sanggup memberikan "tempat kerja yang layak" kepada para lulusan SD; dan jika ada sedikit kesempatan, biasanya hal tsb. tidak sesuai dengan ambisi anak dan orang tua. Sebab ambisi mereka lebih banyak terarah pada hasrat melanjutkan sekolah ke SMP dan seterusnya untuk kemudian menjadi pegawai negeri , walaupun kondisi ekonomis orang tua hampir-hampir tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya tsb.

Banyak orang desa kemudian menyatakan, bahwa terlalu banyak mendapatkan pendidikan formal di SD dst. itu mengakibatkan ongkos yang mahal berupa : semakin banyak anak desa terdidik meninggalkan desa dan membelakangi bidang pertanian. Sedang desa sangat memerlukan tenaga kerja muda dan terdidik untuk meningkatkan produktivitas

dan taraf kehidupan keluarga. Oleh aktivitas pendidikan, daerah pedesaan kehilangan banyak tenaga "terdidik" yang bermigrasi ke daerah perkotaan, sedang daerah urban lebih banyak memetik buahnya yang pahit berupa masalah-masalah sosial sebagai akibat dari proses migrasi tsb.

Perolehan pendidikan SD memberikan alasan rasional kepada para lulusan untuk mencari ruang hidup di luar sektor pertanian. Maka ada anggapan umum "semua orang butahuruf dan tidak berpendidikan adalah petani dan buruh kasar, sedang mereka yang berpendidikan berhak menjadi pegawai negeri". Muncul gambaran yang keliru mengenai relasi di antara wutasastra dengan bercocok tanam dan pertukangan, dan relasi antara melek-huruf/pendidikan dengan kepegawaian. Edukasi dilihat sebagai aspirasi mendapatkan posisi di luar pertanian. Perolehan pendidikan SD "tidak sesuai atau tidak imbang" dengan kerja sawah dan berburuh. Maka type kerja tani yang bergelut dengan tanah itu dilihat sebagai "rendah dan kasar", tidak menarik, di bawah martabat peradaban orang muda yang berpendidikan SD pedesaan.

Dilihat dari segi strategi, sistem pendidikan SD desa lebih banyak berorientasi pada nilai-nilai urban. Sebabnya a.l. ialah : para pembuat kebijakan dan para politisi yang duduk dalam pelbagai Education Board adalah kaum intelegentsia urban dengan "way of life" dan raison d'entre sendiri. Dengan itikad baik mereka menyoy-

dorkan citra mengenai model-model ideal "manusia utama" dan "sekolah/pendidikan ideal" yang dituangkan dalam strategi pembangunan pendidikan untuk seluruh wilayah tanah air. Maka strategi dan perencanaan pendidikan jelas bertolak dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai urban, dari realitas pribadi pemimpin dengan norma-norma dan penafsiran sendiri. Karena itu sifat perencanaan kurang mengaitkan anak-didik dalam situasinya, khususnya anak desa di tengah kebudayaan ruralnya, untuk siapa strategi dan perencanaan edukatif itu ditujukan. Maka kondisi masyarakat desa dengan tingkat kebudayaannya itu perlu diperhitungkan dalam penentuan strategi pendidikan.

Hal ini bukan berarti bahwa kaum élite urban itu tidak memikirkan permasalahan edukatif di desa; tetapi disebabkan oleh "urban way of life" yang berbeda sekali dengan cara hidup orang desa dengan latar belakang kultural yang berbeda. Kejadian ini memunculkan becak-becak picak budaya atau kebutaan kultural (kebutaan psikis), sehingga terlewatlah esensi dari permasalahan-permasalahan edukatif di daerah-daerah pedesaan.

Citra dan harapan masyarakat desa ialah agar strategi dan perencanaan pendidikan di daerah rural itu memperhatikan asas-asas sbb. :

- 1) Bertolak dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai rural.
- 2) Berawal dari realitas pribadi, yaitu realitas anak-didik desa dalam situasinya, pada saat itu; bertolak

pula dari kebutuhan-kebutuhan serta harapan anak-didik dan warga-desa.

- 3) Menuju pada taraf produktivitas di samping hidup damai bergotong royong, sehat, bahagia dan aman sentausa.

Perencanaan dan strategi pendidikan pada banyak segi memang tidak berawal dari kebutuhan dan harapan masyarakat setempat, karena harus sesuai dengan "overall-planning" pembangunan nasional. Hampir selalu semuanya bertolak dari pertimbangan logis dan kebijakan politis para pemimpin di puncak hierarki pemerintahan yang dianggap paling valid, baik dan benar. Kemudian ada semacam ketidak-percayaan para pemimpin akan kemampuan rakyat kecil/desa untuk mawas secara bening kebijakan edukatif. Mereka dianggap bodoh dan tidak tahu akan makna pendidikan. Sebaliknya, menurut penulis, yang paling tahu mengenai kebutuhan rakyat desa dan kebutuhan pendidikannya adalah subyek warga-desa itu sendiri, yang merasakan secara langsung urgensinya jenis pendidikan tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan sendiri.

Lingkungan sosio-budaya dan ekologis urban menyebabkan penalaran dan citra yang berbeda pula pada penghuninya. Karena itu sulit bagi banyak penguasa, politisi dan pemimpin élite urban untuk benar-benar menghayati cara hidup orang desa dan kebutuhannya. Sebab semua pertimbangan, nilai dan norma individu itu sifatnya "cul-

tuur-gebonden". Dengan intensi luhur para policy -makers dan pemimpin pada pelbagai Education Boards berusaha memahami permasalahan pendidikan dasar pedesaan. Namun tetap saja usaha tersebut mengandung celah-celah dan limitasi, a.l. berupa : mereka itu pada umumnya berfikir dengan kader referensi sendiri untuk rakyat, khususnya untuk anak-didik desa dan warga-desa dengan kriteria dan norma urban. Mereka tidak berfikir dan merasa bersama-sama dengan rakyat, akan tetapi lebih banyak memikirkan untuk rakyat; dan dalam situasi sedemikian ini anak desa dan rakyat lebih banyak berperan sebagai obyek-pendidikan daripada subyek pendidikan.

Pendidikan dasar formal pedesaan banyak berisikan nilai, materi, kriteria dan fikiran urban ; berasaskan kriteria klas menengah; hanya sedikit saja menyertakan aspirasi dan harapan rural. Dengan begitu sekolah dasar desa baru memberikan kontribusi minim pada upaya penanggulangan keterbelakangan dan kemiskinan yang luas di daerah pedesaan. Isi pengajaran kurang mengait struktur dan kebutuhan masyarakat desa dengan kondisi ekologis, ekonomis dan sosial-budaya. Orientasi kurikulumnya lebih banyak bermuatkan nilai-nilai kultural urban dan aspirasi akademis; SD desa harus mempunyai relevansi dengan SLTP, SLTA, Akademi, Perguruan Tinggi.

Maka menjadi permasalahan besar bagi kita ialah : bentuk pendidikan yang bagaimanakah yang sangat diperlukan oleh anak desa dan masyarakatnya?

3. Pentingnya bahasa-ibu bagi pendidikan dasar pedesaan.

Dalam proses pendidikan, pendidik perlu memahami penghayatan anak-didik desa di tengah lingkungan hidupnya yang diungkapkan lewat bahasa-ibu. Maka pendidikan yang tidak mengakui hal ini ditakutkan akan beroperasi secara depositer dan indoktrinatif. Kata dan pikiran guru banyak tidak dimengerti oleh anak desa, sebab bahasanya menggaungkan nada dan aspirasi yang sangat berbeda. Bahkan ucapan guru dan pendidik menjadi retorik asing berkepanjangan yang tidak bisa dimengerti oleh anak-didik desa.

Fikiran dan bahasa manusia itu berkembang secara dialektis dalam satu struktur referensi budaya tertentu (dalam hal ini budaya rural; menjadi persyaratan struktural). Supaya aktivitas mendidik yang dilakukan lewat dialog terbuka dan bahasa yang efektif, para pendidik sebaiknya memperhatikan persyaratan struktural ini. Maka dengan bantuan bahasa-ibu, kejadian-kejadian yang bertentangan di desa, posisi-posisi yang berlawanan dalam struktur sosial desa, dan macam-macam kemacetan kondisi hidup bisa dibahas di kelas, untuk dipecahkan oleh anak bersama-sama dengan guru. Dengan begitu situasi sosial-ekonomis desa yang tidak/belum mapan itu bisa diubah dan diperbaiki bersama.

Bahasa dipakai oleh pendidik sebagai sarana berdialog dengan anak desa, khususnya untuk membangunkan kesadaran anak selaku subyek yang belajar mandiri dengan misi dan fungsi kemanusiaannya. Karena itu dalam upaya mendidik perlu diperhatikan bahasa ibu (daerah) yang dipelajari

anak sejak berfungsinya dria pendengaran, penglihatan dan penalarannya, yang kemudian dikondisionir oleh lingkungan budaya kaumnya. Pada akhirnya bahasa-ibu menjadi unsur yang mendarah-daging dalam kepribadian anak.

Jika bahasa ibu ini secara sistematis didiskualifisir dan dijauhkan dari diri anak, misalnya tidak diajarkan di sekolah basis dan lebih banyak digantikan oleh bahasa buatan kaum cerdik pandai dan para penguasa dengan "bahasa asing" yang asing bagi anak desa, anak-didik bisa menjadi kelu-bisu, sebab tidak mampu mengekspresikan fikiran, perasaan dan kemauannya dengan bahasa asing yang belum dikuasainya. Anak menjadi kurang mampu berdialog karena kekurangan perbendaharaan kata-kata.

Di samping itu diskualifikasi secara total bahasa-ibu bisa mengakibatkan hilangnya identitas kultural sendiri , lalu memunculkan alienasi terhadap eksistensi hidup sendiri. Bahasa-ibu sendiri, yang tidak boleh dipakai secara resmi, menjadi tanpa arti (zinloos) dan kurang dihargai; bahkan mengalami devaluasi di mata anak-didik. Sedang bahasa asing yang harus dipakai oleh anak, tidak atau belum dikuasainya. Di kemudian hari, tanpa bahasa-ibu anak desa bisa menjadi gagu secara psikis, serta tidak berdaya terhadap invasi-invasi kultural dari luar.

Penghapusan bahasa-ibu mengakibatkan dialog insani yang spontan menjadi terhambat; juga merintang pribadi anak untuk merealisasikan diri selaku "makhluk dia-

log" untuk berbincang-bincang secara terbuka, dan mengang-
kat dunia sekitar menjadi dunia human. Anak desa lalu
menjadi kesepian di tengah kebudayaan sendiri. Maka melar-
ang anak memakai bahasa-ibu sendiri berarti melarang anak-
didik untuk "menjadi lebih" sesuai dengan cita-cita ru-
ral yang otentik. Karena itu ekstradisi bahasa-ibu je-
las akan menyulitkan anak-didik untuk menyatakan kata-kata,
kesan, pikiran, emosi, sentimen dan harapan-harapan
sendiri lewat ekspresi bebas dan spontan.

Bangsa-bangsa yang lama ada di bawah penindasan ke-
kuasaan kolonial, menghayati bahasa-ibu sebagai alat un-
tuk menyatakan identitas otentik yang tenggelam atau se-
ngaja ditenggelamkan oleh pemerintah kolonial, dan ada di
bawah tekanan hegemoni bahasa import/asing dari para pe-
ngusaha. Kebudayaan kolonial menggantikan bahasa-ibu de-
ngan bahasa kolonial selaku instrumen penguasaan psikis
yang efektif terhadap rakyat jajahan. Karena itu sekolah-
sekolah bukan menjadi panti tempat berdialog; tetapi meru-
pakan sentra menyampaikan kominiké, pengumuman, preskripsi,
dekrit dan undang-undang dari para penguasa.

Pengalaman anak-anak pada usia sangat muda lewat
bahasa-ibu itu sangat esensial dan menentukan bagi pemben-
tukan kepribadian selanjutnya. Semua pengalaman yang diper-
oleh anak melalui pemahaman, perasaan dan kemauannya itu
diperoleh dengan bantuan bahasa-ibu. Karena itu diskuali-
fikasi bahasa-ibu pada usia sangat muda misalnya di TK

dan SD desa, dapat menimbulkan kejadian tragis berupa pembantuan anak dari kebudayaan sendiri dan identitas kultural kaumnya (suku bangsanya), sedang pengakaran pada kebudayaan baru belum berlangsung. Sebagai akibatnya anak-anak desa tadi jadi "kabur kanginan" tanpa tali-pegangan dan akar-pengikat di bumi sendiri (menjadi migran potensial).

Adalah esensial bahwa pengajaran selama periode-periode perkembangan tahun-tahun awal kehidupan anak itu bisa lebih banyak dilakukan dengan bantuan bahasa-ibu sendiri, khususnya bagi anak-anak desa. Sebab kontak dengan kehidupan dan lingkungan sekitar itu dihayati oleh anak melalui bahasa-ibu secara afektif. Selanjutnya, paksaan menggunakan bahasa non-ibu pada umur-umur amat muda menyebabkan banyak pengertian-pengertian yang kabur pada anak mengenai milieu dan kebudayaan sendiri; dan penangkapan makna-makna jadi lebih sulit. Oleh karena itu sebaiknya penggunaan bahasa-ibu di sekolah-sekolah dasar pedesaan bisa diperbanyak dan lebih diintensifkan. Saran ini ditunjang oleh hasil observasi penulis di 23 SD desa di Kabupaten Jombang, dalam mana sebagian besar waktu sehari-hari dipakai oleh anak dan warga-desa untuk berkomunikasi dengan bahasa-ibu, yaitu bahasa Jawa. Contoh lain ialah pengajaran di Sovyet Uni pada saat sekarang dilakukan dalam 66 bahasa ibu (Edgar Faure, 1974, h.42).

Penggunaan bahasa-ibu berasaskan prinsip sbb. : pemahaman anak akan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan

lebih afektif melalui bahasa-ibu. Maka pengajaran bahasa-ibu di daerah-daerah periferi di Indonesia di satu pihak dapat menjadi sarana penunjang bagi pertumbuhan bahasa Indonesia, dan di pihak lain dapat dijadikan sarana pendukung bagi mekarnya kebudayaan daerah dengan nilai-nilai budaya yang tinggi. Di samping itu sesuai pula dengan isi penjelasan Bab XV UUD. 1945, pengajaran bahasa-ibu/daerah dapat dilakukan dan dikembangkan di daerah-daerah yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan GBHN (Ketetapan MPR.No. IV/MPR/1978): pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam kerangka pengembangan bahasa Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pemer kaya perbendaharaan bahasa Indonesia.

Pengembangan bahasa daerah juga erat kaitannya dengan pengembangan kebudayaan daerah yang menjadi unsur pendukung bagi mekarnya kebudayaan nasional; di samping erat akrab dengan identitas dan otentisitas suku-suku bangsa kita yang kaya akan tradisi, nilai-nilai esthetis, serta norma-norma moral. Maka kearifan tradisi itu memberikan bobot kemantapan dan keyakinan yang ditampilkan a.l. dengan : ungkapan bahasanya, khususnya bahasa warga-desa.

Bahasa ibu, kebudayaan daerah dan tradisi leluhur itu merupakan totalitas fungsional yang terintegrasi, dan memberikan gaya hidup tersendiri bagi satu kelompok suku atau bangsa. Lagi pula setiap individu selalu mereaksi secara emosional terhadap bahasa-ibunya, tradisi dan kebuda-

yaan kaumnya. Bahasa-ibu juga memberikan pola "unggah - ungguh atau tata sopan-santun, kesusilaan dan rasa keindahan tersendiri bagi pribadi pemakainya.

Sistem nilai yang diungkapkan dengan nilai-nilai ethis oleh bahasa-ibu itu memberikan stabilitas, sekuritas dan kebanggaan tersendiri. Karena itu bahasa-ibu melestarikan kebudayaan daerah, di samping membentuk watak dan kepribadian (suku) bangsa. Maka kurangnya perhatian dan pengabaian terhadap bahasa-ibu, terlebih lagi jika tidak dipakai sama sekali melulu memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa intelektual saja, walaupun mempunyai nilai politik tinggi, dikhawatirkan di kemudian hari dapat menimbulkan ekses a.l. berupa :

- (1) ikut musnahnya norma-norma susila, unggah-ungguh atau tata sopan-santun pergaulan, dan nilai-nilai esthetis kebudayaan daerah (ungkapan wangsalan, peribahasa, amsal, doa, kidung, tembang, syari'at, dll.) yang diungkapkan dengan bahasa-ibu.
- (2) Munculnya banyak verbalisme, formalisme, kurang duga prayoga, tidak toleran, tingkah laku kasar, pelanggaran terhadap adat dan hukum formal, keliaran perilaku yang tidak terkendali, dll. di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan uraian di atas, seyogyanya bahasa-ibu terus dikembangkan dan diperbanyak penggunaan secara formal di sekolah-sekolah, terutama sekali di SD-SD desa

sebagai alat berdialog dan bahasa intelektual. Sebab bahasa ibu sangat efisien sebagai alat refleksi-diri dan refleksi terhadap lingkungan hidup sendiri. Sekaligus juga sebagai sarana pengungkap nilai-nilai luhur dari budaya daerah di samping sebagai alat pengungkap nilai-nilai moral.

Bahasa menunjukkan bangsa; bahasa memantulkan tinggi-rendahnya daya fikir dan mentalitas bangsa. Bahasa memantulkan jiwa (suku) bangsa, dan memberikan panutan pada usaha memperkaya kepribadian manusia. Karena itu bahasa-ibu patut kiranya dikembangkan demi upaya penggalian nilai-nilai luhur warisan nenek-moyang kita, untuk dimanfaatkan sebagai pedoman bagi pembentukan karakter bangsa, upaya mendidik dan usaha pembangunan, khususnya bagi daerah pedesaan.

Untuk usaha ini jelas diperlukan good-will politik, keputusan politik pemerintah dan perbuatan politik untuk melaksanakan maksud tersebut, khususnya untuk membentuk kepribadian manusianya, yaitu anak dan warga-desa lainnya.

4. Ringkasan wawasan kultural, prinsip-prinsip pendidikan dan kurikulum.

Pada intinya wawasan kultural itu bermaksud untuk memberikan garis panutan bagi pembuatan policy dan perencanaan pendidikan, agar dapat difikirkan model generatif edukasi rural sesuai dengan budaya dan kebutuhan daerahnya, yang dapat dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi dan modernisasi.

Di samping itu wawasan kultural juga memberikan kelengkapan visi mengenai pendidikan kedesaan pedesaan bagi anak-anak desa kepada wawasan filsafi, pedagogik teoretis, sosial-ekonomis dan politis; sehingga dimungkinkan pendekatan secara multi-disipliner mengenai gejala edukasi tsb. Selanjutnya dapat difikirkan bentuk pendidikan pedesaan yang fungsional dan berorientasi pada kebudayaan nasional untuk menampilkan kepribadian bangsa kita sendiri.

Diasumsikan bahwa yang dibutuhkan oleh anak dan masyarakat pedesaan kita ialah bentuk pengajaran dan pendidikan yang bertolak dari realitas kemiskinan atau kebudayaan pendapatan rendah, agar dengan perolehan pendidikan tadi orang serta anak desa mampu memecahkan/mengatasi

masalah keterbelakangan, kesempitan dan kemiskinan di desa, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup warga-desa menuju pada era teknologi dan modernisasi.

Atas dasar prinsip demokrasi (sesuai dengan sila ke III dari Pancasila), pemerintah dapat menyertakan semua pihak yang berkepentingan dengan masalah pendidikan pedesaan --terutama warga-desa sendiri-- untuk bersama-sama bermufakat menyusun isi pelajaran, metode mengajar dan tujuan segera (jangka pendek) pendidikan. Maka sekolah desa dapat dijadikan sentrum budaya untuk proses transmisi nilai-nilai budaya yang bermanfaat, di samping menjadi bingkil latihan untuk mempraktekkan hak-hak asasi manusiawi selaku warganegara dalam iklim demokrasi.

Sampailah kita kini pada prinsip-prinsip pendidikan mengikuti wawasan kultural, yaitu sbb. :

- 1) Kebudayaan desa dan lingkungan ekologis itu jelas ditransmisikan oleh angkatan tua kepada anak keturunan lewat kegiatan belajar-mengajar, yaitu via edukasi. Semua nilai dan teknologi bertani yang sederhana itu mempengaruhi kepribadian dan cara hidup anak desa. Pada hakekatnya lembaga pendidikan itu harus menjadi bagian terintegrasi dari masyarakat desanya, dan mengadaptasikan diri terhadap lingkungan kulturalnya.
- 2) Dalam alam demokrasi Pancasila, pendidikan pedesaan mendapatkan arti, fungsi dan energi dari dan dalam

lingkungan budaya bangsa sendiri. Maka pendidikan di daerah rural harus dapat menegakkan eksistensi dan integrasi anak didik dengan masyarakat dan kebudaya-an sendiri.

- 3) Tujuan pendidikan kedesaan ialah : membawa anak agar menjadi subyek bebas yang dapat menghayati diri sendiri sebagai person yang tengah menjadi, dan bukan sebagai subyek yang terhalang menjadi dan membudaya di tengah lingkungan budaya kaumnya.
- 4) Anak-didik desa merupakan totalitas/keluluhan dengan lingkungan dan budaya kaumnya. Sadar atau tidak anak berusaha mengintegrasikan diri dengan kehidupan orang dewasa dan masyarakat desanya, hingga lingkungan tsb. dihayati sebagai bagian dari pribadinya.

Pengalaman kultural ini jelas memberikan stempel khas kepada anak desa, yang kemudian membentuk kualitas, nilai pengalaman, "value judgement" dan gaya bertingkah laku serta bersikap tersendiri. Berkatalah W. Banning (1965; 5) : "Melepaskan atau mengisolir manusia dan anak manusia dari masyarakat dan lingkungan kulturalnya merupakan "een zakelijke vergissing en zedelijk vergrijp". Karena itu lembaga pendidikan bagi anak-anak desa harus menyajikan model kurikulum dan pengajaran-pendidikan yang hidup, berfaedah, diperlukan dan cocok dengan situasi kebudayaan pedesaan setempat (lokal dan regional).

(4) Para guru dan pendidiknya harus paham dan memperhatikan pula kondisi kultural masyarakatnya dengan ciri-ciri khasnya demi upaya materialisasi kurikulumnya. Sebab anak desa membutuhkan kesempatan pendidikan khusus untuk memahami situasi lingkungan sekitar dan pengalaman eksistensial kaumnya di tengah derasnya arus modernisasi dan urbanisasi. Maka ada bimbingan yang "rural agrarian oriented" dan bentuk "education for change".

Sampailah kita sekarang pada pemikiran pembuatan kurikulumnya, berdasarkan wawasan kultural, sbb. :

- (1) Perencanaan kurikulum bertolak dari prinsip, budaya dan nilai-nilai rural; juga berawal dari realitas nyata anak dan warga-desa, yaitu kebudayaan pendapatan rendah dengan segenap kebutuhannya. Sebab semua pertimbangan nilai dan norma bagi penentuan kurikulum itu selalu "cultuur-gebonden". Maka benda-benda, nilai-nilai dan norma-norma budaya rural itu hendaknya bisa ditemukan pada isi kurikulum; dan di dalam prakteknya diajarkan melalui sembilan mata pelajaran yang sudah ada (dan penambahan mata pelajaran baru) yang dilengkapi dengan latihan-latihan kerja.
- (2) Perencanaan kurikulum juga mengaitkan materinya dengan manusia/anak-didik di dalam situasinya sekarang. Individualitas anak-didik supaya ditemukan kembali dalam visi total kemanusiaannya, yaitu terintegrasi da-

lam masyarakat desa dan kebudayaan kaumnya, agar bisa mengangkat harkat dan martabat dirinya. Maka materi pengajaran (isi kurikulum) sebaiknya bercorak lokal, dan berkaitan dengan realitas hidup lokal, situasi konkrit, situasi eksistensial anak-didik dengan segenap kebutuhannya. Materi pengajaran sedemikian kita jumpai pula pada sembilan mata pelajaran atau bidang studi yang telah ada.

(3) Etik pemberian pendidikan kepada anak desa dan masyarakat desa itu diawali dari pemahaman mengenai hakikat kebudayaan masyarakatnya dengan semua kebutuhan, harapan dan aspek-aspek positifnya.

(4) Tujuan pendidikan ialah : perbaikan hidup di desa, mengentas warga-desa dari ngarai kemiskinan.

Maka kurikulum SD pedesaan hendaknya memfokuskan masalah KEMISKINAN menjadi "thema sentral" untuk dipermasalahkan di dalam kelas, di-dialog-kan, di-problematisir, disadari dan dipecahkan bersama supaya anak dan warga-desa bisa keluar dari "impasse" yang ada. Pelajaran semacam ini dilakukan lewat mata pelajaran PMP, IPS dan Ketrampilan Khusus. Dengan demikian diharapkan agar anak-didik dapat berkembang sebagai individu bebas dengan identitas sendiri yang rural sifatnya disertai rasa kebanggaan; dan masyarakatnya juga dapat berkembang secara otentik dengan ciri-ciri lokal rural menjadi "wujud bagi diri sendiri".

IV. WAWASAN SOSIAL-EKONOMIS.

Bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, sektor pertanian (termasuk perikanan/kenelayanan dan peternakan) merupakan alas dasar bagi ekonominya. Dalam ekonomi agraris, paling sedikitnya 80% dari rakyat masih menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian dan perikanan, terutama yang bermukim di daerah pedesaan. Maka kaum tani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat tradisional miskin, dan daerah-daerah desa pertanian serta pantai-pantai merupakan daerah yang miskin (kalau tidak yang paling miskin) dan terbelakang secara kultural di tanah air.

Dari ± 80 juta penduduk di Jawa, lebih dari 82% tinggal di daerah pedesaan, yaitu ± 64 juta jiwa manusia (Dirjen PMD. Depdagri, 1971); sebagian besar daripadanya terdiri atas petani-petani dan nelayan-nelayan tradisional. Dilihat dengan kriteria sosiologis, desa-desa di Jawa merupakan stratifikasi sosial paling bawah, dan ada dalam kondisi miskin pada batas subsistensi/bestaansmarge. Dalam keadaan sedemikian, sektor ekonomi yang menyangkut mati-hidup masyarakatnya, menduduki fungsi sentral, sebab erat berkaitan dengan "perut" dan pendapatan rendah/kecil yang mengkondisionir semua bentuk perilaku rakyatnya.

Sehubungan dengan hal di atas muncul kebudayaan pendapatan rendah dengan sistem nilai dan norma rural tersendiri, dengan usia yang sangat tua dan areal amat

luas di tanah air. Nilai dan norma ini beroperasi secara fungsional dan menentukan tingkah laku penghuninya. Kondisi pendapatan rendah tsb. memberikan limitasi terhadap usaha-usaha ekonomis dan terhadap upaya mendapatkan pendidikan bagi anak-anak desa. Jadi jelas memberikan batasan pada berhasil tidaknya upaya-upaya edukatif di daerah pedesaan.

Uraian berikut akan membahas tiga masalah, yaitu :

1. Kondisi ekonomis pedesaan di Jawa pada umumnya.
2. Kaitan edukasi dengan struktur ekonomi pedesaan.
3. Ringkasan wawasan sosial-ekonomis, prinsip-prinsip pendidikan dan kurikulum.

1. Kondisi ekonomis pedesaan di Jawa pada umumnya.

Konperensi para theolog se Asia di Wannapura, Sri Lanka tgl. 7-20 Januari 1980 menyatakan, kondisi menyedihkan pada golongan miskin, terutama di daerah-daerah pedesaan, disebabkan oleh sistem eksploitatif kaum kapitalis, dan dominasi berkepanjangan oleh kelompok kaum ber-uang dari dalam maupun luar. Timbul ketidak-samaan sosial, khususnya disebabkan oleh pertumbuhan yang tak imbang antara daerah-daerah perdagangan-perkotaan di satu pihak, dan daerah rural di pihak lain. Oleh pola tradisional dan kemiskinan yang meluas dan merata, berkembang pola ploretariat rural. Khususnya di Jawa, penghuni daerah pedesaan digolongkan sebagai agrikulturis marginal dan miniskul, petani-petani gurem (Sayogyo, 1978).

para pedagang ketèngan dan buruh tani murah. Maka masyarakatnya merupakan "rural slums" pasca-tradisional dengan ciri-ciri antara lain sbb. :

- 1) Ada eksplosì penduduknya dengan angka kelahiran $\pm 2 - 3\%$.
- 2) Menyempitnya tanah garapan dan persawahan per kapita.
- 3) Ada pengaruh sistem moneter urban yang semakin ketat terhadap perekonomian desa, tidak ada kumulasi modal di desa-desa.
- 4) Dependensi yang semakin besar dari daerah pedesaan pada pasaran urban; penetapan harga produksi pertanian oleh kekuatan-kekuatan eksternal.
- 5) Sistem agraris lemah, metode produksi yang ringkih menua.
- 6) Kaitan parasiter antara ekonomi urban dengan ekonomi pedesaan karena pertumbuhan hypertrophis sektor komersial modern belum memberikan dukungan fisik pada sektor agraris.
- 7) Struktur sosial dan sistem administrasi desa yang terbelakang dan belum berkembang. Ada sistem pemerintahan dan politik urban yang hierarkis burokratis dan semakin efektif efisien mengatur masyarakat pedesaan.
- 8) Meningkatnya masa kerja yang murah, dan penghasilan per kapita yang rendah di daerah-daerah pedesaan.
- 9) Orientasi masyarakat terhadap tradisi, kolektivisme, mite-mite dan takhayul terhadap kekuatan gaib yang sering memperlambat upaya modernisasi dan pengaruh edukatif.
- 10) Banyak penghuni desa masih ada dalam kondisi butahuruf, menjadi wutasastra lagi; niveau rendah dari taraf

pendidikan penghuninya.

- 11) Metode agraris yang semakin intensif mengarah pada proses involusi agrikultural (Clifford Geertz), serta kemiskinan yang merata/shared poverty dan meluas.

Survey pemerintah tahun 1970 menyebutkan, kepemilikan tanah sbb. : 90% dari penduduknya memiliki tanah seluas kurang dari 0,5 Ha. Dari para pemilik ini ± 60% adalah petani tanpa kepemilikan sebidang tanah (penggarap, penyewa, penyakap, pekerja upahan, buruh, maron). Selanjutnya perkembangan produksi beras sebagai intensifikasi dan ekstensifikasi penggarapan sawah dengan INMAS, BIMAS dll. hanya sekisar antara 1 - 1½% per tahun. Akibatnya setiap tahun selalu ada minus di sektor pertanian dengan dampak langsung : pemerintah harus mengimport beras. Kondisi ini makin memburuk dengan bertambahnya jumlah pengangguran dan merosotnya standard hidup di daerah pedesaan.

Ditambah kemudian dengan dampak pewarisan dualisme sistem ekonomi (Dr. Boeke, 1962) y.i. oleh usaha pemerintah dan swasta yang capital-intensive didukung oleh modal asing di sektor industri, onderneming perkebunan dan komersial, serta sistem agraris minuskul berskala gurem yang labour-intensive, terjadilah banyak kekenjangan sosial. Jarak kaya-miskin menjadi semakin lebar dan muncul segugus perbedaan antara lokasi geografis urban dengan yang rural. Timbul pula diferensiasi ekonomis antara harga produksi agraris yang rendah ditetapkan oleh pemerin-

tah, dengan harga produksi industri yang tinggi dan ditentukan sendiri oleh pengusaha. Jarak diferensiasi ekonomis antara kedua sistem produksi ini menjadi semakin besar, dengan akibat jauh berupa : diferensiasi sosial dan kultural antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan, juga diferensiasi edukatif.

Perkembangan sektor ekonomi modern dan industri belum menjangkau atau mengikut-sertakan klas rural yang berkekurangan dalam pembagian keuntungan ekonomis, sosial dan budaya. Rakyat desa tidak dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern dan industri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : (a) tidak memiliki modal; (b) sistem administrasi dan birokrasi urban yang kurang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (c) tidak memiliki basis pendidikan dan ketrampilan yang cukup.

Selanjutnya, oleh banyak pengaruh urban (proses urbanisasi) dan semakin intensifnya kaitan politis antara daerah kota dengan desa, ditambah media massa dan pengaruh ilmu pengetahuan modern inklusif pengaruh edukatif yang masuk ke daerah-daerah pedesaan, menjadi semakin ketatlah pengaturan terhadap daerah rural. Masyarakatnya lebih banyak menjadi obyek-pengaturan dari kekuatan-kekuatan eksternal, dan banyak merasakan pengalaman-pengalaman yang pahit. Sebagai akibatnya, banyak orang desa memberikan penilaian kurang simpatik terhadap pengaruh-pengaruh luar/urban, ilmu pengetahuan dan aktiv-

itas pendidikan yang masuk ke desa. Banyak penduduk desa menjadi bimbang dan bingung oleh pengaruh edukatif modern, yang dihayatinya sebagai kurang tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sehubungan dengan uraian di atas, jika kita menginginkan perkembangan eksistensial di negara kita, perkembangan itu hendaknya diawali dengan usaha pengembangan daerah pertanian dan desa-desa pantai. Sebab kedua daerah ini sebagai basis negara merupakan kunci pembuka bagi upaya pengembangan wilayah di tanah air. Perkembangan ini diharapkan dapat menumbuhkan dinamisme masyarakat dan warga-desa, yang diikuti dengan reorientasi/revisi sistem pendidikannya di daerah pedesaan.

2. Kaitan edukasi dengan struktur ekonomi pedesaan.

Struktur pendidikan merupakan sistem terintegrasi dengan hampir segenap komponen kehidupan di tengah masyarakat; yaitu melibatkan banyak pihak dan unsur sebagai penunjang kelancaran proses pendidikan. Ekonomi dan pendidikan merupakan dua komponen yang memberikan pengaruh timbal-balik. Dilihat dari satu segi, pendidikan/sekolah merupakan komponen ekonomi yang penting, karena memproduksi tenaga kerja untuk memasuki pasaran kerja, dan membentuk manusia-manusia ekonomis yang membangun masyarakatnya demi kelestarian hidup bangsa.

Laju kecepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi

pada dekade-dekade terakhir sebesar 3-6½% per tahun (survey pemerintah) ternyata baru memberikan keuntungan minimal pada strata sosial paling miskin di daerah pedesaan. Sebab keuntungan di sektor industri, pertambangan dan komersial modern belum menyebar rata dan tidak sama besar didistribusikan ke bawah. Lagi pula sektor primer modern belum mampu menampung/memanfaatkan sumber-sumber daya manusia desa dengan edukasi yang minim. Padahal pengelolaan tenaga manusia lewat edukasi hingga menjadi produktif jelas merupakan tujuan ekonomis dan sosial yang sama pentingnya dengan laju pertumbuhan produksi domestik rata-rata/GDP. (M.I. Tuqan, 1979).

Fakta menyatakan, pengangguran dan buruh dengan gaji di bawah standard sebagian besar ada di daerah pedesaan. Mengingat realitas ini perlu kiranya difikirkan :

- (1) strategi pengembangan nasional berorientasi pada pertanian, berfokus pada kemiskinan;
- (2) upaya edukatif bertolak dari realitas nyata di daerah rural, yaitu bertolak dari keterbelakangan, serta rangsang produktivitas dan efektivitas ekonomisnya.

Usaha ini didukung oleh kebijakan dan aktivitas pendidikan yang berorientasi-awal dari kemiskinan (a poverty oriented education policy). Sebab jika pendidikan ingin memberikan kontribusi positif kepada pengembangan daerah rural (sektor agro-ekonomi dan agraris tradisional), pendidikan harus mengadaptasikan-diri pada kebutuhan masya-

rakat lokal dan kondisi pasca-agraris.

Implikasi policy pendidikan yang berorientasi-awal dari kemiskinan ialah : edukasi massa miskin di daerah pedesaan akan menjadi ekonomis, dan menjadi kebutuhan sosial guna merangsang pengembangan, sesuai dengan sila kemanusiaan dan demokrasi Pancasila. Karena itu diperlukan bentuk pendidikan yang agrarian oriented (umum, khusus, dan training praktis) bagi anak-anak dan warga-desa yang belum terjangkau oleh pertumbuhan ekonomi modern guna mempertinggi produktivitas dan penghasilan rata-rata. Jadi ada distribusi pendidikan lebih banyak/intensif dan lebih merata bagi semua kelompok sosial (wanita, pria, anak-anak, pemuda). Kebijakan pendidikan kedesaan yang baru ini meliputi :

- 1) Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan untuk membangkitkan partisipasi yang lebih banyak pada pembangunan.
- 2) Pengadaan latihan ketrampilan dan vak-vak yang dibutuhkan sekali bagi daerah pedesaan lewat pendidikan dasar formal, non-formal, vocational training.
- 3) Pelaksanaan manajemen pendidikan kedesaan yang efisien, dengan menyertakan partisipasi warga-desa yang kompeten, sesuai dengan prinsip demokrasi.

Sekolah, khususnya SD dan sekolah lanjutan dapat memberikan bentuk ketrampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan ekonomis desa, dan menempa sikap-sikap sosial yang ethis, beserta etik kerja yang tinggi. Dengan demi-

kian ketidak-sinambungan antara pendidikan-pengajaran formal (SD desa) dengan tuntutan kehidupan sehari-hari dapat diminimalisir, bahkan dapat dijadikan instrumen-pemecah dan alat pengembang bagi masyarakatnya.

Pendidikan diharapkan benar-benar berfungsi dalam realitas konkrit masyarakatnya untuk menggugah dinamika hidup dan kemajuan, di samping membantu menjawab kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari. Karena itu perlu dimasukkan pelajaran memahami lingkungan hidup sendiri di dalam kurikulum sekolah untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kampung halaman sendiri, dan upaya mengatasi kemiskinan. Pengajaran-pendidikan dasar desa secara definitif harus mengait tuntutan dan kebutuhan ekonomis pedesaan untuk mengatasi keserba-kekurangannya. Karena itu pra-latihan kerja di bidang pertanian, peternakan, perikanan, bangunan, pemeliharaan fisik, kesenian daerah, administrasi sederhana dan perdagangan (agroteknologi dan agroekonomi) sudah dapat diajarkan sejak di SD.

Maka inti kegiatan pendidikan dasar pedesaan itu ialah :

- a. kerja produktif dan kooperatif, serta etik kerja tinggi, lewat vocational training (awal);
- b. penanaman sikap rasional dan kritis terhadap permasalahan hidup sehari-hari di desa sendiri, pembentukan karakter dan kepribadian anak lewat pendidikan umum.

Maka sekolah banyak menyibukkan diri dengan melakukan

pendidikan moral dan pendidikan sosial ekonomis untuk membentuk manusia-manusia ekonomis yang produktif dan "marketable" di pasaran kerja. Kiranya upaya-upaya praktis ini lebih urgen daripada pengoperan macam-macam pengetahuan abstrak dan spesialisasi tinggi untuk melakukan adaptasi terhadap masa transisi dan dampak modernisasi, serta berguna untuk mengatasi keterbelakangan.

Sikap-sikap positif dan apresiasi terhadap kampung halaman dan wilayah pedesaan dapat ditemukan kembali pada materi pelajaran sekolah, untuk diteliti, dicobakan/dieksperimenkan dan dikembangkan kemudian hari. Maka didorong oleh motivasi dan pengaruh edukatif yang tepat, anak dirangsang tinggal di daerah pedesaan dengan sikap kritis realistis guna mengatasi kesulitan dan kemiskinan. Maka sejak di SD dapat diterapkan metode pemecahan masalah lokal; misalnya mengatasi masalah kegersangan tanah, kekurangan air, penanggulangan banjir, pemberantasan hama, kekurangan modal, pemberantasan riba, pengembangan koperasi, intensifikasi peternakan, dst.

Pendidikan dasar pedesaan perlu menekankan upaya penanaman nilai-nilai hidup kedesaan yang positif untuk memupuk rasa cinta pedesaan. Karena itu pendidikan dasar diharapkan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat desa, hingga perolehan edukatif dapat dijadikan instrumen pemecah, juga alat pencegah mengalirnya anak-anak muda desa ke kota-kota.

Exodus orang-orang muda desa ke daerah perkotaan itu pada umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomis pedesaan yang dikondisionir/diperkuat oleh pengaruh edukatif. Jelasnya sbb. :

- 1) Lewat proses pendidikan, secara langsung atau tidak, terjadi proses pengoperan nilai dan norma-norma urban yang kurang rasional bahkan amat konsumtif pada anak desa (di samping pengoperan aspek-aspek positifnya).
- 2) Lewat perolehan pendidikan SD para lulusan mendapatkan visi lebih luas mengenai dunia luar/ kota yang lebih maju, sejahtera dan makmur; ada bayangan indah mengenai dunia di seberang sana, dan muncul bayangan buram mengenai dunia pedesaan sendiri yang kurang riil.
- 3) Oleh bentuk pendidikan dengan materi pelajaran yang "urban oriented" sekarang, anak desa kurang mendapatkan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap masalah-masalah desa sendiri disebabkan sistem target dan kelulusan. Hasilnya, anak mengalami alienasi terhadap lingkungan dan budaya kaumnya.
- 4) Sistem pendidikan kita sekarang memang baik; namun kurang memperhitungkan milieu kultural dan kondisi kemiskinan yang luas terdapat di daerah pedesaan. Sistem edukasi justru mendorong anak menjadi "wegahan", enggan bekerja tani dan kenelayanan, enggan tinggal di daerah pedesaan; ikut mengkondisionir anak desa untuk memasuki daerah-daerah perkotaan, yaitu menjadi calon-calon migran potensial.

5) Timbul idee fixed sbb.: bersekolah SD itu identik dengan "bekerja di balik meja tulis" atau menjadi pegawai negeri, dan tak patut bagi para lulusan untuk bekerja di sawah dan lautan.

Pendidikan SD desa lebih menekankan konformitas terhadap pola strategi pendidikan nasional dan pembangunan nasional; juga merupakan ekstrapolasi warisan pendidikan kolonial masa lampau yang dikombinasikan dengan penjabaran model-model ex import, kurang menyertakan kebutuhan, aspirasi dan unsur budaya lokal. Tanpa disengaja hal tsb. mengkondisionir anak desa menjadi lebih pasif (pendidikan depositer, proses inkasasi pasif; Paulo Freire), dan membuat mereka menjadi kurang kritis terhadap milieu sosial pedesaan sendiri. Lalu berlangsung proses alienasi dengan akibat jauh : Sekolah Dasar pedesaan cenderung ikut mengkondisionir anak untuk membelakangi identitas ruralnya. Oleh banyaknya materi pelajaran yang harus diserap oleh anak-didik sekarang, mereka kekurangan waktu untuk mawas situasi lingkungan sendiri, bahkan cenderung mengabaikannya; kurang memahami masalah-masalah familial dan lokal penting yang harus dipecahkan dengan segera secara bersama-sama.

Jika anak-didik SD tidak diantar oleh guru/pendidik ke arah pemahaman masalah-masalah sendiri dan lingkungan sosial via informasi edukatif, betapa mungkin mereka bisa sampai pada pemahaman tsb.? Oleh proses alie-

nasi itu anak semakin terdorong untuk membelakangi sektor pertanian dan pedesaan. Dengan kata-kata lain, sejak di SD anak telah dikondisionir menjadi migran-migran potensial menuju ke daerah perkotaan.

Esensi masalah migrasi dan arus urbanisasi memang ada pada faktor internal desa sendiri, yaitu kondisi sosial-ekonomis dengan unsur kemiskinan, ditambah dengan bentuk edukasi yang tidak/kurang menanamkan kesadaran dan kecintaan pada nilai-nilai desa. Akibatnya anak-didik dan orang mudanya jadi terbantun dari akar hidupnya, yaitu milieu desa. Maka berlangsunglah proses alienasi terhadap pola hidup sendiri.

Di samping itu, disilaukan oleh kemegahan industrialisasi dan modernisasi di dunia Barat, dan besarnya hasrat untuk mengejar ketinggalan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, tak sedikit politisi dan policy-maker pendidikan kita melupakan aspek kultural lokal dan anthropologis sendiri (bahkan yang belum pernah mereka kaji). Secara terburu-buru mereka ingin menanam-pindahkan secara otomatis model-model edukasi negara-negara yang sudah maju dan dianggap lebih sempurna di bumi tanah air kita. Sehubungan dengan hal ini tampaknya ada penilaian-kurang terhadap nilai rural dan benda-benda budaya sendiri; bahkan kebanyakan dari mereka lebih menghargai hal-hal yang masuk dari luar (foreign, xenocentrisme).

Karena sistem pendidikan itu merupakan organisme

yang hidup, berupa praxis sosial beritikad luhur untuk membudayakan anak manusia, sebaiknya sistem ini senantiasa membuka diri bagi ide-ide baru yang subur, khususnya yang berasal dari tanah air sendiri dan dari daerah-daerah periferi (pedesaan, daerah pedalaman) agar reformasi dalam dunia pendidikan dapat ikut menjawab tantangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa.

Pada banyak segi sistem pendidikan merupakan refleksi dari kesadaran nasional, kebudayaan dan identitas bangsa sendiri. Karena itu strategi pendidikan harus sesuai dengan aspirasi nasional dan kepribadian bangsa ; bersumber pada kebudayaan bangsa yang pada hakekatnya didukung oleh kebudayaan regional dan lokal pedesaan. Juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rakyatnya. Pengoperan secara otomatis model-model pendidikan negara-negara maju di tanah air kita tanpa adaptasi terhadap kondisi regional dan lokal (rural, daerah pedesaan) , akan membuahkan banyak kesenjangan. Juga memunculkan masalah-masalah sosial dan edukatif, khususnya dalam pelaksanaan, materialisasi kurikulum dan kegunaan praktisnya bagi desa.

Kesulitan ini ditambah dengan banyaknya suku-suku bangsa Indonesia dengan bahasa ibu dan unsur budaya yang beraneka ragam, milieu geografis yang berbeda serta strata ekonomi yang bervariasi. Pluriformitas ini layak difikirkan bagi strategi diferensiasi dan desentralisasi pada tingkat regional dan lokal dalam satu integritas

policy nasional. Jadi ada strategi unifikasi dan sentralisasi tanpa membahayakan kesatuan nasional.

Pendidikan bukan hanya transmisi benda-benda dan nilai-nilai budaya masa lalu saja; juga bukan pengoperan serta-merta teknologi modern dari luar. Karena itu pendidikan harus selalu mawas dengan kesadaran bening hal-hal sbb. :

- 1) Milieu dan struktur masyarakat desa sebagai bagian wilayah Nusantara akan dikembangkan menjadi model-model yang bagaimana lewat upaya-upaya pendidikan?
- 2) Tujuan-tujuan apakah yang ingin dicapai oleh warga desa dan para pemimpin bangsa melalui pendidikan ke-desaan, khususnya lewat pendidikan basis pedesaan.
- 3) Type-type manusia pembangun macam apakah yang ingin dicetak lewat aktivitas pendidikan dasar pedesaan secara konkrit?

Ketiga pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomis, pola hidup lokal, latar belakang ideologis filsafat/pandangan hidup penghuni desa yang serba berkekurangan. Juga dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang relevan di luar bidang pendidikan, misalnya dengan pengadaan lapangan kerja, produktivitas agraris, kondisi ekologis yang rusak, proses urbanisasi, usaha transmigrasi, imbalanced-imbangan sosial, tingkat teknologi di tengah keprimitifan masyarakat desa, standard hidup yang wajar, taraf kemiskinan dan seterusnya.

Ringkasnya ada pendekatan sosial-ekonomis terhadap masalah-masalah pendidikan kedesaan; ditunjang oleh pendekatan ekologis. Sebab setiap pengajaran- pendidikan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari milieu dan kondisi daerahnya, khususnya daerah pedesaan. Banyak permasalahan edukatif dapat dipecahkan dengan memuaskan, jika saja orang dengan cermat melihatnya dalam konteks satu sistem yang lebih besar, yaitu milieu di mana sistem edukasi tersebut menjadi bagian terintegrasi daripadanya. Sebab memecahkan permasalahan edukatif pedesaan murni dengan strategi pendidikan saja pasti tidak akan mencukupi. Karena itu perlu difikirkan strategi global yang cukup rasional, melalui pendekatan sosial-ekonomis dan ekologis yang dapat diterapkan pada pelbagai kondisi-situasi kehidupan masyarakat desa yang cukup bervariasi, demi pengembangan sistem pendidikan kedesaan yang sehat, bermanfaat dan rasional.

Edukasi itu bukan hanya konservasi terhadap warisan- warisan lama saja, juga bukan ekstrapolasi dari pragmatisme sempit; akan tetapi hendaknya lebih berupa: upaya (1) perfeksi (perbaikan, reformulasi dan penyempurnaan) warisan budaya-budaya lama dan budaya lokal; (2) upaya menyajikan alternatif-alternatif pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal, kebutuhan manusiawi di tengah lingkungan hidupnya, agar bisa digunakan sebagai alat multi-guna untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup.

Karena itu semua lembaga pendidikan patut meremajakan diri dan terus-menerus membuka diri; melakukan adaptasi tepat terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Maka gerak, aliran, perubahan, pembaharuan tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan, jika edukasi ingin mempertahankan fungsinya. Inilah yang disebut sebagai "revolusi kultural" dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian pendidikan tidak sekedar berjalan di atas rel-rel rutin yang aus; tetapi selalu saja mengadakan orientasi kritis dan refleksi-diri dengan jalan menambah ide, visi, praktek-praktek baru; ada education for change. Khususnya pendidikan semacam ini sangat berguna bagi anak dan warga-desa yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap banyak pengaruh eksternal yang semakin ekstensif dan intensif, serta semakin mencemaskan hati mereka. Oleh akselerasi perubahan yang maha cepat di daerah-daerah pedesaan ("revolusi daerah rural"), perlu difikirkan bentuk edukasi yang tepat-guna dan fungsional secara ekonomis bagi warga-desa.

Kondisi ekonomi di daerah-daerah pedesaan itu jelas tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal dan ketentuan-ketentuan politik pemerintah kita. Proses pendidikan Pedesaan berlangsung dalam satu lingkungan kultural tertentu yaitu kebudayaan rural yang pasca-tradisional. Karena itu, memperhitungkan aspek-aspek ekonomis dari upaya pendidikan juga selalu menyertakan faktor -

faktor sosio-budaya serta wawasan kultural. Perencanaan dan pertimbangan ekonomis juga perlu memperhatikan perencanaan filsafi, pemikiran pedagogis teoretis, serta ketentuan-ketentuan politik mengenai praktek pendidikan bagi daerah pedesaan demi kemungkinan pelaksanaannya.

Sebaliknya pertimbangan ekologis, teknis-edukatif, kultural, pemikiran teoretis, dan semua keputusan politik pemerintah mengenai sistem pendidikan kita, khususnya mengenai pendidikan dasar di desa harus menyertakan pula perencanaan finansial dan ekonomisnya. Karena itu memecahkan masalah-masalah pendidikan dasar rural itu memerlukan pendekatan multi-disipliner untuk dapat menjangkau informasi komprehensif yang sangat diperlukan bagi usaha-usaha revisi, reorganisasi, restrukturalisasi dan penyempurnaan bagi sistem pendidikan dasar di daerah pedesaan.

3. Ringkasan wawasan sosial-ekonomis, prinsip-prinsip pendidikan dan kurikulum.

Setelah memperhatikan wawasan ekonomis di atas, sampailah kita pada beberapa prinsip pendidikan, yaitu sbb. :

- (1) Asas utama upaya pendidikan ialah kebutuhan langsung dari negara kita, dan bukan pengoperan model-model pendidikan asing. Bagi pendidikan dasar pedesaan, asas utamanya ialah pemenuhan sandang, pangan dan pa-

pan serta peningkatan taraf hidup. Karena itu pendidikan kedesaan harus berpredikat : sehat, rasional, bermanfaat, tepat-guna dan fungsional secara ekonomis; jelas mampu menanggapi kebutuhan ekonomis desa ybs. Maka motivasi-motivasi ekonomis dibobot lebih berat oleh warga-desa pada umumnya daripada motivasi lainnya, mengingat bahwa masalah "pengisian perut" tidak dapat ditunda-tunda terlalu lama.

- (2) Tujuan pendidikan : karena bagian besar wilayah negara masih agraris tradisional sifatnya, maka jika pendidikan kita ingin memberikan kontribusi positif kepada perkembangan daerah pedesaan (sektor ekonomis dan agraris), pendidikan harus mengadakan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomis setempat. Strategi pendidikannya berorientasi pada pertanian, sedang upaya-upaya pendidikan harus bertolak dari realitas konkrit desa, yaitu kemiskinan. Jadi ada bentuk edukasi yang berorientasi pada masyarakat dan sektor agraris (community oriented- and agrarian oriented education) yang didukung oleh "a poverty oriented education policy". Diharapkan agar pendidikan mempunyai relevansi tinggi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomis desa; y.i. bertujuan membuat anak-didik mampu mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan. Pada akhirnya tujuan pendidikan semacam ini pasti akan bermanfaat bagi tumbuhnya kepercayaan pada kemampuan eko-

nomis bangsa sendiri, dan tidak banyak bergantung pada bantuan-bantuan modal asing dan hutang luar negeri.

(3) Proses dan sistem pendidikan :

pendekatan sosial-ekonomis terhadap masalah-masalah pendidikan kedesaan ini dilakukan, mengingat bahwa keberadaan sistem pendidikan itu selalu ada dalam konteks sosial-ekonomi dan politik-ekonomi negara. Sehubungan dengan alasan ini, perlu adanya integritas lebih besar lagi dari sektor agraris ke dalam ekonomi nasional dibarengi dengan usaha-usaha agro-ekonomis dengan landasan yang realistis. Dengan demikian akan dapat diharapkan perkembangan sebenarnya /sejati dari wilayah pedesaan dengan ciri-ciri karakteristik agrikultural. Ada pemusatan ikhtiar pemerintah dan seluruh bangsa pada pertumbuhan yang sehat dari sektor pertanian (daerah pedesaan) yang didukung dengan satu sistem pendidikan kedesaan yang memadai, yang sudah dapat diawali sejak di SD ; ada tambahan perhatian pada masalah-masalah agro-ekonomis.

(4) Dengan pendidikan yang rural-agrarian oriented anak-didik/dituntun untuk menilik, mendialogkan serta memahami lingkungan hidup/ekonomis sendiri, dan memecahkan permasalahan hidup sehari-hari dengan sikap yang lebih realistis --tidak bersikap pasif dan apatis, atau dengan jalan bermigrasi ke kota-- melalui kurikulum pelajaran yang menitik beratkan pada kerja produktif; ada vocational training atau latihan kerja.

(5) Semua kegiatan edukatif tadi memerlukan ajaran moral, etik kerja tinggi, pembentukan sikap realistis, dan pendidikan sosial-ekonomis untuk menimbuhkan apresiasi terhadap lingkungan hidup pedesaan sendiri. Jadi bisa ditanamkan dan dikembangkan nilai-nilai hidup kedesaan yang positif, sehingga berkurang kecondongan anak muda untuk membelakangi identitas rural dan tercegah proses alienasi terhadap situasi sosial-ekonomis desa sendiri (lewat upaya pendidikan).

Sampailah kita sekarang pada penyusunan kurikulumnya, disesuaikan dengan wawasan sosial-ekonomis, sbb. :

- (1) Diperlukan adanya kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan langsung, yaitu kebutuhan ekonomis warga desa. Tujuan jauhnya ialah : mendukung pertumbuhan yang sehat dari sektor pertanian sebagai basis kekuatan ekonomis negara, dan mengatasi kemiskinan.
- (2) Pelajaran pertama dan utama ialah pelajaran memahami diri sendiri, lingkungan hidup, dan kondisi ekonomis desa; untuk kemudian menemukan cara-cara pemecahannya. Jadi ada kurikulum yang berthemakan "cinta desa dan kampung halaman sendiri" dan penemuan metode pemecahan masalah lokal sejak di SD. Semua ini penting bagi pembentukan sikap hidup ekonomis yang sehat di tengah milieu budaya pedesaan.
- (3) Ada relevansi dan kegunaan langsung dari materi pelajaran kedesaan (isi kurikulum); bercorak lokal, dan

dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomis desa. Pengetahuan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kewiraswastaan diintegrasikan di dalam kurikulum.

- (4) Banyak melakukan kerja produktif dan kerja kooperatif, khususnya untuk menolong pemenuhan kebutuhan sekolah, biaya sekolah bagi murid-murid, dan meringankan beban ekonomis orang tua. Ada kombinasi dari kegiatan belajar teori-teori/informasi di kelas dengan aktivitas-aktivitas sosial dan banyak kerja produktif di lapangan.

Maka kurikulum ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan mampu menanggapi masalah-masalah sosial agraris. Dengan demikian berlangsunglah integrasi antara sekolah dengan masyarakat, dan antara murid-murid/anak dengan kehidupan orang tua serta masyarakat desa.

Bidang studi/mata pelajaran yang dapat merealisasikan kurikulum terurai di atas (1) s/d (4) ialah PMP, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, IPA, IPS, Kesenian dan Ke-trampilan Khusus, dan sejarah.

- (5) Kurikulum yang "rural agrarian oriented" yang mempunyai korelasi dan relevansi tinggi dengan sektor agro-ekonomi didukung oleh ilmu pengetahuan serta jenis teknologi tepat-guna, semua itu diperkenalkan sejak di SD, agar perolehannya dapat dipakai untuk membangun kehidupan sejahtera dan lebih "leefbaar" lagi.

- (6) Anak-didik : lewat pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan itu anak dituntun menjadi "homo economicus" yang mampu berwira-swasta, dapat menolong diri sendiri, mengangkat derajat dan martabat hidupnya. Pendidikan dikembangkan dalam batas-batas ekonomis lokal. Maka akan muncul kebutuhan belajar di tengah masyarakat desa, bila orang meyakini adanya relevansi pendidikan dengan keuntungan ekonomis serta dapat mempertinggi produktivitas dan efektivitas ekonomis.
- (7) Manfaat . edukasi ialah apabila pendidikan berlandaskan kebenaran rural lokal, dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomis masyarakatnya. Untuk pelaksanaan kurikulum (5) dan (6) mata pelajaran PMP, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, IPA, IPS, Kesenian serta Ke-trampilan Khusus dapat dimanfaatkan untuk hal ini.
- (8) Lewat kurikulum formal dan ekstra, sekolah desa di - rangsang mempersiapkan tenaga-tenaga kerja trampil untuk memasuki pasaran kerja dengan bekal sosial dan teknis yang memadai (tujuan praktis dan ekonomisnya).

Pendidikan dan ekonomi merupakan dua bidang kehidupan yang saling mengait, mempengaruhi, berkorelasi dan menunjang, baik di tingkat mikro, meso maupun makro. Dari sudut pandangan ekonomis, pendidikan dapat disebut sebagai investasi ekonomi dan komponen ekonomi untuk mendidik manusia-manusia ekonomi Indonesia yang tangguh.

V. WAWASAN POLITIS. KAITAN POLITIK DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DESA

Desa sebagai basis kekuatan negara harus dapat dikendalikan dengan efisien oleh pemerintah; sebabnya ialah: (1) desa adalah teritorium basis kekuatan ekonomis yang menjadi supplier bahan pangan bagi daerah urban; (2) desa merupakan "balance of power" di sektor politik bagi kekuatan-kekuatan urban dengan loyalitas dan dukungan mayoritas pendidiknya guna menjamin stabilitas negara.

Salah satu produk kritis gawat dari proses modernisasi yang diintrodusir pemerintah kita di daerah pedesaan ialah impact politisnya berupa banyak kesenjangan antara daerah kota dengan pedesaan (daerah pedalaman). Kesenjangan tsb. menjadi karakteristik politis dan kultural yang menonjol di tengah masyarakat yang tengah membangun dan mengalami proses modernisasi; juga menjadi sumber pokok bagi instabilitas politik, di samping merupakan hambatan primer bagi integritas nasional, yang semuanya harus segera dipecahkan oleh sistem politik dan sistem pendidikan nasional kita.

Pada sub-bab ini akan dibahas masalah-masalah sbb.:

1. Pengaruh modernisasi politik terhadap daerah pedesaan, dan kesulitan usaha rekonstruksi sistem pendidikannya.
2. Invasi kultural dalam dunia pendidikan.
3. Proses reformulasi, transformasi dan sinkretisme dalam sistem pendidikan dasar pedesaan.

4. Ringkasan wawasan politis, prinsip-prinsip pendidikan dan kurikulum.
5. Rangkuman semua wawasan, dan faedah pendekatan secara multi-disipliner.

1. Pengaruh modernisasi politik terhadap daerah pedesaan dan kesulitan usaha rekonstruksi sistem pendidikannya.

Modernisasi merupakan sumber pelbagai perubahan dengan diterapkannya banyak model baru yang pada umumnya dijabarkan dari pengalaman Barat. Tingkat modernisasi biasanya diukur dari perkembangan kotanya, disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi, sentra kemunculan kelas-kelas sosial baru dan kebudayaan modern. Kota juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan dan politik. Semua itu mengakibatkan pertumbuhan ibukota dan kota-kota menjadi sangat cepat dan berbeda sekali dengan evolusi yang berlangsung di daerah pedesaan. Karena itu pertumbuhan masyarakat kota dan masyarakat desa mengikuti pola perkembangannya sendiri.

Kota sebagai sumber inovasi teknologi, kekuatan ekonomi dan politik secara langsung memberikan pengaruhnya yang bersifat mengatur, diarahkan pada kemajuan dan modernisasi. Maka modernisasi mengarah pada efisiensi dan peningkatan kesejahteraan umum. Namun pada saat yang sama, modernisasi memberikan dampak beban ekstra bagi daerah rural, a.l. berupa kebutuhan-kebutuhan baru dan tuntutan-tuntutan

baru yang semakin meningkat, tapi kurang esensial bahkan justru memberatkan beban ekonomis warga-desa (vide konsumerisme dan ambisi-ambisi materiil yang tidak wajar).

Oleh proses modernisasi dan pertumbuhan fisik yang cepat, kota-kota menjadi tidak stabil. Maka untuk mempertahankan neraca kestabilannya, perlu adanya pengendalian daerah pedesaan dijadikan neraca keseimbangan dengan jalan: (1) menambah partisipasi rakyat desa di sektor politik lewat sosialisasi dan partisipasi politik, serta pendidikan politik; (2) atau membuat daerah rural menjadi satelit-satelit politik bagi daerah urban, dan masyarakatnya dijadikan "floating mass". Karena itu kunci stabilitas politik amat ditekankan pada suksesnya usaha para pemimpin negara dalam mendidik dan memobilisir massa rakyat desa di bidang politik guna mendukung sistem politik yang ada. Termasuk di dalamnya ialah mendidik kesadaran politik dan sosialisasi politik lewat pendidikan dasar rural, agar mereka kelak menjadi warganegara yang utama.

Ketidak-stabilan daerah urban oleh coup d'etat, demonstrasi, pemogokan pemberontakan, keributan, kriminalitas, dll. merupakan produk-sampingan dari proses modernisasi yang sifatnya minor tidak terlalu berbahaya, universal namun sukar dihindari meletusnya. Sebaliknya ketidak-stabilan dan keresahan rural sifatnya mayor, bisa berbahaya dan fatal, dan dapat meledak menjadi revolusi sosial dengan perubahan-perubahan fundamental untuk menentang orde yang

tengah berkuasa (S.P. Huntington, 1972, 290- 292). Tetapi semua keresahan tadi mudah dihindari dan dikendalikan oleh pemerintah, yaitu bergantung pada efektivitas berbagai institusi urban dalam mendidik massa desa, khususnya mendidik anak desa lewat pelajaran kewarganegaraan, sejarah, IPS, PMP dan bahasa Indonesia.

Jika pemerintah kita menginginkan ketenangan dan kestabilan politik, mutlak perlu adanya dukungan daerah-daerah pedesaan yang sifatnya relatif stabil dan tenang. Apabila pemerintah kurang mampu mendidik massa desa dan tidak mendapatkan support dari daerah pedesaan, kestabilan negara akan sangat terganggu.

Kota-kota, khususnya ibukota selamanya menjadi pusat pembuatan keputusan politik, sosial-ekonomi, kultural dan edukatif tingkat nasional. Selanjutnya sepanjang sejarah para politisi dan pejabat eksekutif mempunyai latar belakang kehidupan urban. Juga orde sosial yang mendominasi secara politis adalah orde yang "the most highly urbanized" (S.P. Huntington, 1972) dengan *raison d'être*, kerangka referensi, cara berfikir dan interest sendiri. Sebagian besar dari politisi, decision-maker dan élite penguasa adalah kaum inteligentsia urban dengan latar pendidikan Barat, berasal dari kelas menengah dengan kedudukan sosial yang jauh jaraknya dari rakyat kecil dan populasi desa. Sebagai akibatnya pada umumnya mereka kurang memahami kondisi-situasi daerah periferi dan aspirasi rural, khususnya aspirasi pen-

didikannya.

Banyak pemimpin beranggapan, bahwa kebijakan dan kebenaran terakhir (khususnya bagi policy pendidikan) hanya boleh diputuskan oleh mereka saja sebagai pihak yang paling kompeten berfikir untuk rakyat dan anak-didik. Konsep pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan kader referensi kelompok sendiri. Maka fakta di lapangan membuktikan bahwa ketentuan dan konsep-konsep "dari atas" itu kebanyakan sulit dipahami oleh rakyat desa, dan banyak yang tidak menyambung dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat desa. Namun orang desa tidak mempunyai kekuasaan untuk memperbaiki atau mengoreksinya, dan menerima semua ketentuan dengan rasa "sumarah".

Selanjutnya pengutamaan pengembangan sektor politik di Indonesia pada masa Orde Lama, dan prioritas pengembangan sektor ekonomi modern (industri dan niaga didukung oleh modal luar) pada awal Orde Baru, menyebabkan kurangnya perhatian pada kondisi pedesaan kita yang pasca-tradisional. Secara implisit menyebabkan kurangnya perhatian pada kondisi SD pedesaan di luar pengelolaan secara rutin.

Sistem SD desa sama dengan SD di daerah perkotaan, dan pada hakekatnya merupakan perpanjangan dari sistem sekolah dasar lama (vervolgschool, sekolah angka loro, schakel-school, sekolah rakyat); sehingga belum sinkron dengan kebutuhan masyarakat desa, juga kurang mendukung pemecahan masalah/kesulitan hidup warga-desa.

Selain itu upaya mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju adalah utama; namun dalam ketergesa-gesaan mengejar tujuan tsb. justru menghambat pengembangan model-model pendidikan yang orisinal di tanah air, yaitu model yang "hidup", berfaedah, diperlukan dan cocok dengan budaya rural dan kebutuhan masyarakat desa.

Unsur budaya daerah dan nilai-nilai lokal justru banyak yang tersisihkan, untuk ditempati oleh model-model pendidikan Barat/asing yang dianggap lebih unggul. Beberapa produk sampingan kemudian muncul, antara lain ialah :

- (1) Pengutamakan pendidikan intelektual dengan inkasasi informasi sebanyak mungkin; kurang adanya pendidikan perasaan terutama cinta pada desa sendiri dan nasionalisme, pendidikan kemauan dan pendidikan watak.
- (2) Pendidikan menekankan masalah "pelajaran" dan penerapan pengetahuan baru (pendidikan depositer, Paulo Freire).
- (3) Menekankan uniformitas dan konformitas, sehingga situasi sosio-budaya yang bervariasi dan situasi lokal kurang diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan pendidikan.
- (4) Materi pelajaran kurang mempermasalahkan realitas hidup dan pengalaman eksistensial anak desa; kemudian banyak terjadi verbalisme.

Di samping itu dalam ketergesa-gesaan mengejar "ketinggalan" dan didorong oleh prinsip kooperatif dengan pa-

ra donor pemberi bantuan pengembangan edukasi yang bilate -
 ral dan multilateral, para konseptor kebijakan pendidikan
 lebih mendahulukan konformitas edukasi dengan : (a) perkem -
 bangan ekonomi dan politik atau dengan "overall planning"
 nasional, dan (b) keinginan para donor pemberi dana, sehing -
 ga kurang menyertakan unsur-unsur kebudayaan asli serta as -
 pirasi-aspirasi lokal dan regional.

Banyak negarawan melihat pendidikan sebagai instru -
men pokok bagi modernisasi politik, sosial dan ekonomi; un -
 tuk meningkatkan kesadaran politik, kesadaran bernegara
 dan bertanah air. Sektor pendidikan diharapkan menjadi
 penghasil utama tenaga trampil di sektor industri, perdagang -
 an, ekonomi dan pembangunan. Namun dalam realitasnya semua
 itu sulit dilakukan, bahkan menimbulkan dampak-sampingan
 dalam bentuk masalah-masalah sosial. Mengenai hal ini Ro -
 bert S. McNamara presiden World Bank Group dalam tulisannya
 "Education" (1974) dengan tandas menyatakan sbb. :

"The education systems of developing countries, however,
 did not offer a good base for national development ,
 either quantitatively or qualitatively. In many develop -
 ing countries, the systems was simply an expansion of
 that of the former colonial rulers. In countries which
 have been long independent, such as those in Latin Ame -
 rica, tradition still bound the education systems to an
 earlier European model that was no longer an effective
 instrument for development.

Regional conferences of education ministers, held
 more than a decade ago, established quantitative goals
 which were sometimes over-ambitious and financially un -
 realistic and which finally were set back by population
 growth."

Pada banyak segi dan sesuai dengan sistem burokrasi, pendidikan kita banyak diatur oleh dogma lama, metode pemecahan konvensional, dan model-model bekas "moederland" serta negara-negara maju tempat para pemimpin memperoleh training dan edukasi. Oleh sebab-sebab di atas, perkembangan pendidikan dasar pedesaan sama dengan yang ada di kota, kurang menyertakan unsur-unsur indigenous rural, lokal dan regional.

Tidak sedikit tokoh non-pendidik (politikus, sarjana hukum, ekonom, dll.) menjadi penentu policy pendidikan, atas dasar pertimbangan "pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik". Jadi orang menekankan aspek politiknya; dan kurang berani mengulik secara serius aspek filsafati-edukatif dan pedagogisnya.

Pencapaian kesejahteraan rakyat --inklusif perolehan pendidikan untuk tenaga membangun-- memerlukan banyak politik. Suatu masalah (juga masalah pendidikan dasar pedesaan) akan menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan, atau ditolak untuk ikut menanganinya.

Dengan pesatnya pertumbuhan demokrasi politik, demokrasi dijadikan prinsip pendidikan, norma dan politik pendidikan, dalam mana semua kebutuhan dan harapan warganegara (termasuk warga dan anak desa) disertakan sebagai materi untuk menentukan kebijakan pendidikan di tengah macam-macam kekuatan sosial di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu diperlukan penataan kembali sistem pendidikan, bahan pela -